



POLRI BELAJAR BIDANG WATPERS POLDA JATENG TAHUN 2023



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



birosdm.poldajateng



<http://birosdm.poldajateng.com>

1. PERATURAN PEMERINTAH NO 1 THN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI
2. PERATURAN PEMERINTAH NO 94 THN 2021 TTG DISIPLIN PNS
3. PERPOL NO 1 THN 2019 TENTANG ADM PENGAKHIRAN DINAS BAGI PNPP
4. PERPOL NO 7 THN 2022 TTG KEPP DAN KKEP SBG PENGGANTI DARI PERKAP 14 THN 2011



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



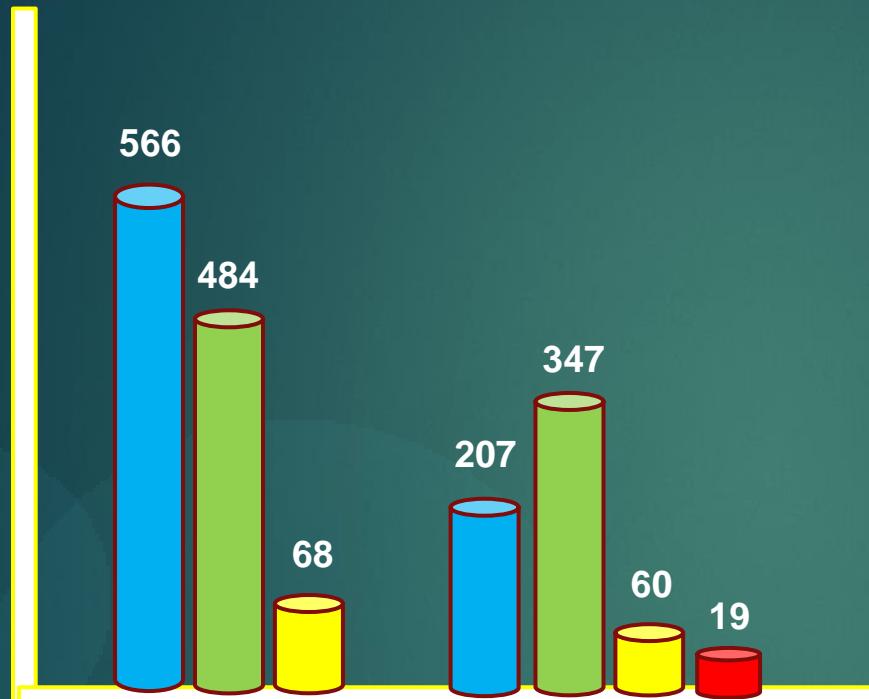
birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng.com

GAMBARAN SUSUT KUAT PERS POLDA JATENG

CONTOH DI TAHUN 2022



SMT I

SMT II

: TAMBAH/MASUK	: 773 ORG
: SUSUT KRN PDH	: 831 ORG
: SUSUT KRN MD	: 128 ORG
: SUSUT KRN PTDH	: 19 ORG

1. DATA SUSUT PNPP SMT I THN 2022 SEBANYAK 484 ORG, DGN RINCIAN PER GOL PANGKAT:
 - a. PATI : 0 ORG
 - b. PAMEN : 73 ORG
 - c. PAMA : 265 ORG
 - d. BRIGADIR : 102 ORG
 - e. TAMTAMA : 0 ORG
 - f. PNS : 44 ORG
2. DATA SUSUT PNPP SMT II THN 2022 (BULAN BERJALAN) SEBANYAK 347 ORG, RINCIAN PER GOL PANGKAT:
 - a. PATI : 0 ORG
 - b. PAMEN : 61 ORG
 - c. PAMA : 144 ORG
 - d. BRIGADIR : 98 ORG
 - e. TAMTAMA : 0 ORG
 - f. PNS : 44 ORG
3. DATA SUSUT PNPP KRN MD : 128 ORG
4. DATA SUSUT PNPP KRN PTDH : 19 ORG

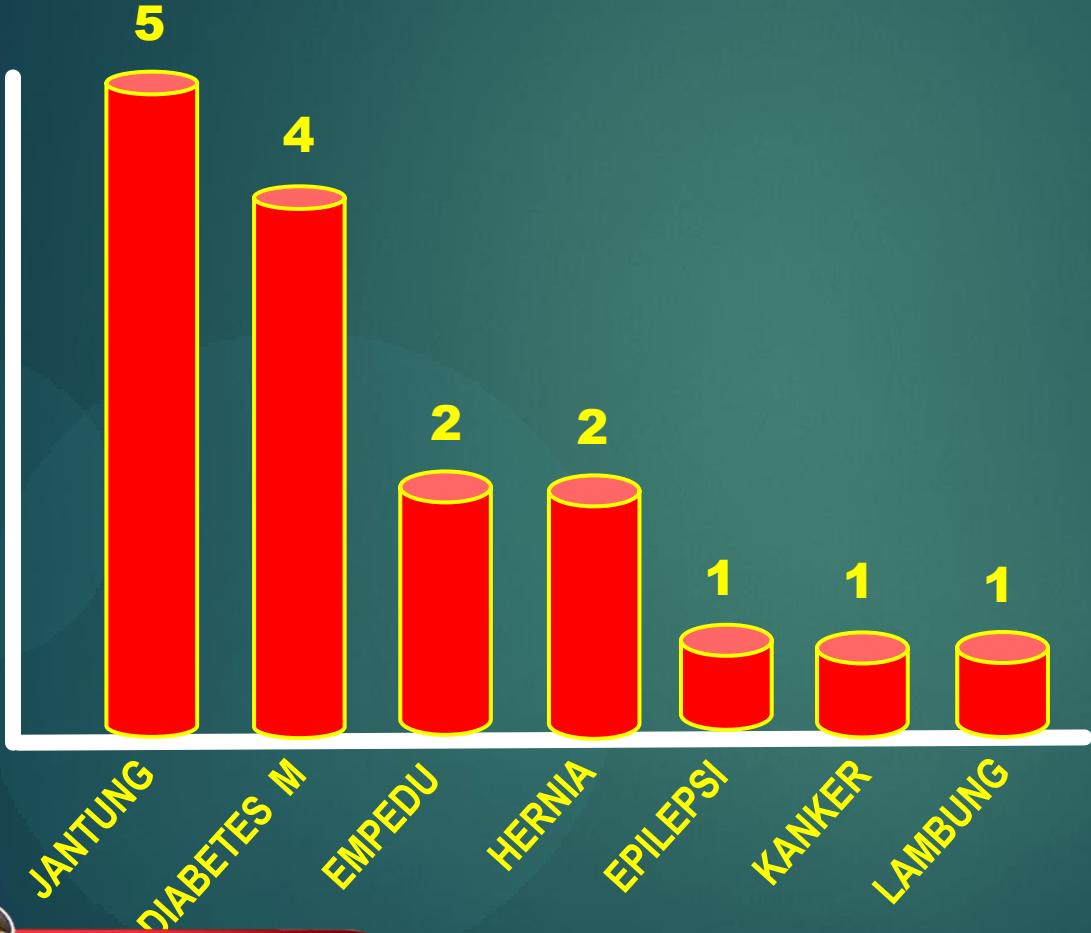
PERBANDINGAN ANTARA TAMBAH DAN SUSUT :

- TAMBAH/MUTASI MASUK : 773 ORG
- SUSUT (PDH, PTDH, MD) : 978 ORG
- SELISIH : - 205 ORG



DATA SUSUT KARENA MENINGGAL DUNIA THN 2023

PERIODE JANUARI SD 11 FEBRUARI 2023 : 19 ORG



ATENSI:

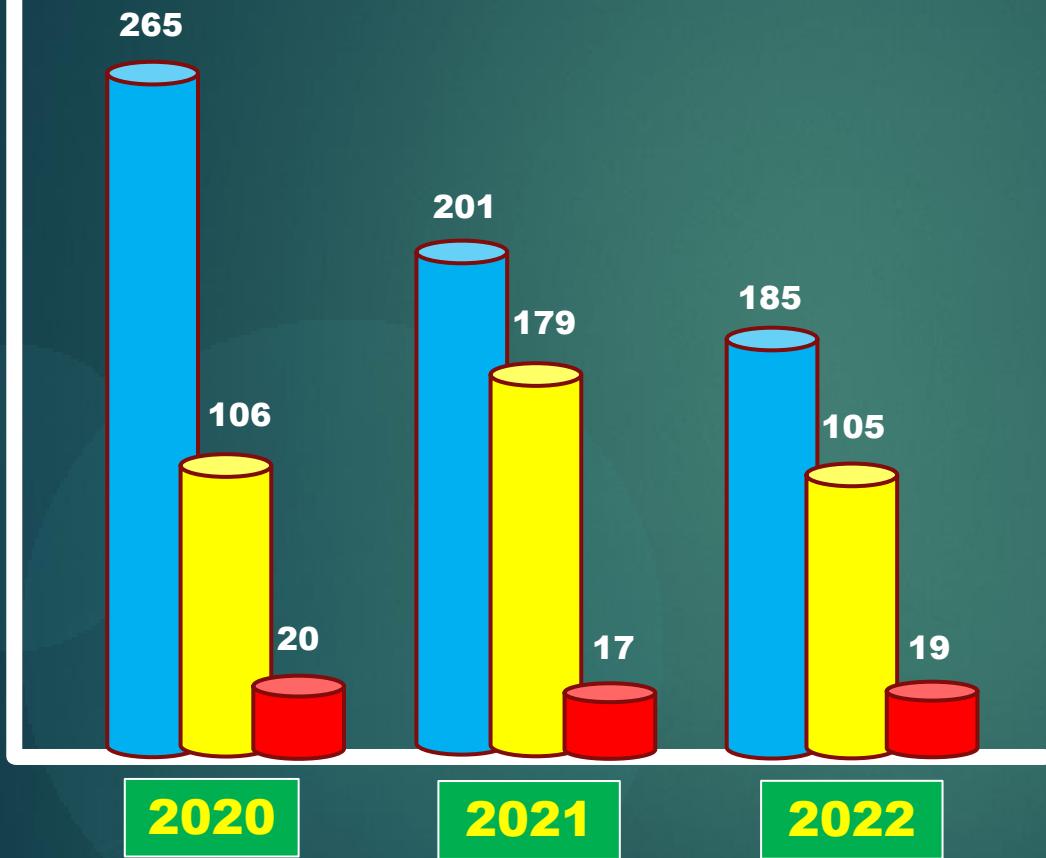
1. SOSIALISASI POLA HIDUP SEHAT
2. LAKS ANEV HSL TKJ DAN RIKKES BERKALA UTK KETAHUI KONDISI KESAMAPTAAN PERORANGAN
3. LAKS PENGENDALIAN BB THD PNPP YG OW/OB DGN TETAP PERHATIKAN KON PERORANGAN / TDK DIPAKSAKAN
4. BG PNPP YG MEMPUNYAI RIWAYAT SAKIT DEGENERATIF AGAR TDK MELAKUKAN LAKUKAN OR YG BERLEBIHAN
5. KOORD DGN FUNGSI KES UTK LAKS YANKESSLING, THD PNPP YG POTENSI SAKIT AGAR SGR LAKUKAN LANGKAH PERAWATAN

GOL USIA KESAMAPTA:

1. GOL 1 (KRG < 30 THN) : 0 ORG
2. GOL 2 (31 SD 40 THN) : 0 ORG
3. GOL 3 (41 SD 50 THN) : 9 ORG
4. GOL 4 (51 - KEATAS) : 10 ORG



JUMLAH PELANGGARAN 3 TAHUN TERAKHIR : 1.097 ORANG



JENIS DAN JUMLAH PELANGGARAN PNPP 3 TAHUN TERAKHIR:

1. DISIPLIN : 651 KSS
2. KEPP : 390 KSS
3. TINDAK PIDANA : 56 KSS

PELANGGARAN YANG BERDAMPAK SANKSI PTDH 3 TAHUN TERAKHIR :

1. THN 2020 : 12 ORG
2. THN 2021 : 20 ORG
3. THN 2022 : 19 ORG

USULAN PTDH YG SDH MASUK
DAN DLM PROSES PELAKS
VERIFIKASI : 23 BERKAS



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng

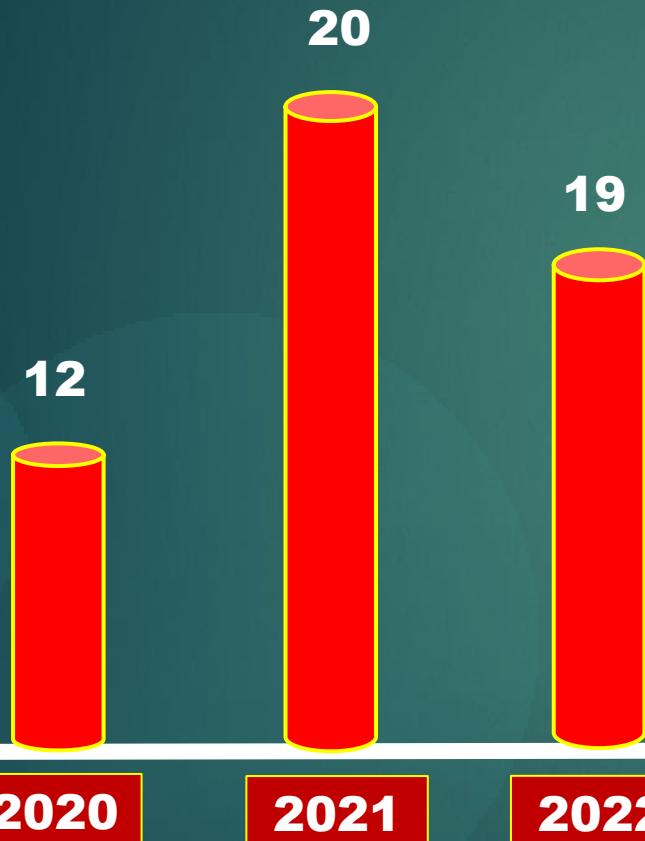


birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng

JUMLAH PNPP YG DI “PTDH” 3 TAHUN
TERAKHIR : 51 ORANG



KETERANGAN PENYEBAB PEMBERHENTIAN
TDK DGN HORMAT (PTDH) 3 TAHUN
TERAKHIR:

1. DESERSI : 26 KSS
2. LAKUKAN TINDAK PIDANA : 13 KSS
3. TP LAHGUN NARKOBA : 9 KSS
4. ASUSILA : 3 KSS



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



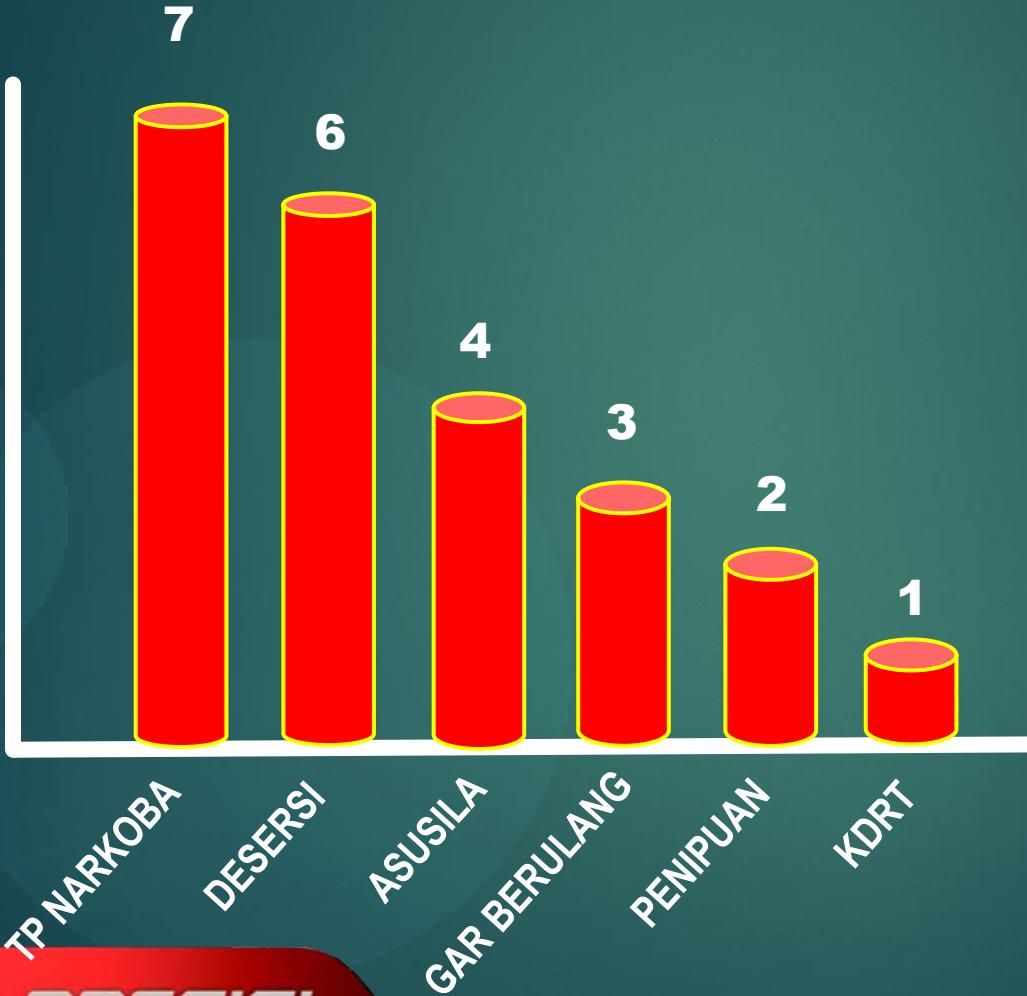
birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng

DATA USULAN PTDH THN 2023

JUMLAH PNPP YG DIUSULKAN PTDH 23 BERKAS



ATENSI:

1. KELENGKAPAN BERKAS SESUAI CHEKLIST YG SDH DITETAPKAN
2. CEK KEMBALI TAHAPAN PROSES PENEGAKAN KEPP, SUSUN SCR BERURUTAN (TERUTAMA URUT NO DAN TGL TERBIT)
3. KHUSUS KSS DESERSI AGAR DOKUMEN LANGKAH BIN DILENGKAP
4. SEGERA LENGKAPI BERKAS /DOKUMEN DAN MULAI SUSUN MATERI PAPARAN SESUAI HSL VERIVIKASI TIM POLDAM, GUNA HINDARI KESALAHAN FORMIL

MSH TERDAPAT BBRP BANDING DR PUT TK PERTAMA YG BLM DILAKS SIDANG BANDING DAN PERMOHONAN PENERBITAN SANKSI KKEP DG PUT PTDH

TIM KOMISI AGAR LEBIH HATI-HATI DLM MEMUTUSKAN SANKSI PD SIDANG KKEP, PEDOMANI FAKTA SIDANG, KRN PUT PTDH SDH SANGAT BANYAK



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng.com

PERPOL
NO 2 THN
2022 TTG
WASKAT

PASAL 7 (1)

- ATASAN MENEMUKN KESALAHAN ATAU PELANGGARAN ANGGOTA, WAJIB MENINDAKLANJUTI DENGAN PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN SECARA DISIPLIN / KKEP SEBAGAIMANA KETENTUAN YG BERLAKU

PASAL 7 (2)

- DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PNPP SERAHKAN KEPADA FUNGSI RESKRIM

PASAL 9

- ATASAN YG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN, DIBERIKAN SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU

ATASAN WAJIB:

- MEMBERIKAN ARAHAN, INSPEKSI, ASISTENSI, SUPERVISI DAN MONEV SCR BERKELANJUTAN

ATASAN SCR BERJENJANG:

- TINGKATKAN KEPEDULIAN THD PERMSLAHAN ANGGOTA
- BUDAYA KEMBALI BERANI MENEGUR THD PERS YG GAR SEKECIL APAPUN (PENYELESAIAN LBH DINI)
- BERANI MENINDAK ANGGT YG MELANGGAR
- PIM JGN TAKUT TDK POPULER



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI

PERKAP NO 2 THN 2022 TTG WASKAT

1. PERKAP NO. 2 THN 2016 TTG PENYELESAIAN GARPLIN ANGGT POLRI
2. ST KAPOLRI NO: ST/81/II/2012 TGL 7 FEB 2012 TTG GAKPLIN ANGGT MENINGGALKAN DINAS TANPA KET YG SAH

CATATAN:

THD GAR DESERSI AGAR DILAKUKAN PROSES BIN (NASEHAT, GAKPLIN, SID DISIPLIN, PENCARIAN, DPO DSB, SEMUA UPY BIN DIBUAT ADM SESUAI LANGKAH YG DILAKUKAN)

Peran pimpinan/atasan :

- a. Pim lebih berperan sbg pembina dari pada pengguna;
- b. Pim/atasan menjadi role model/tauladan bg lingk kesatuan;
- c. Pim/PNPP Pangkat lebih tinggi agar kat kepedulian/perhatian (open - Jawa);
- d. Laksanakan jam pimpinan secara konsisten;
- e. Ciptakan giat bersama baik dinas mapun luar dinas (family gathering, OR bersama);
- f. Pim/PNPP pangkat lbh tinggi dpt menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi konselor terhadap permasalahan anggt;
- g. Dorong PNPP bhw ibadah bukan hanya suatu kewajiban, tetapi jadikan kebutuhan.



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

UPAYA PEMBINAAN PNPP GUNA MENCEGAH “PELANGGARAN”

UPAYA-UPAYA YANG PERLU
DILAKUKAN DALAM
MENEKAN TERJADINYA
PELANGGARAN

1. AKTIFKAN PELAKS JAM PIMPINAN DLM RANGKA PEMBERIAN ARAHAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN SEKALIGUS MEDIA MEMBANGUN KEBERSAMAAN PIM DAN BAWAHAN
2. GELORAKAN TERUS PERAN ATASAN SBG PETUGAS WASKAT (PERPOL 2 THN 2022), SHG ANGGOTA TERHINDAH DARI PERMASALAHAN, DAN APABILA TERJADI PERMASALAHAN DPT TERSELESAIKAN LEBIH DINI
3. UNSUR PIMPINAN LEBIH MEMERANKAN DIRI SBG PEMBINA DARIPADA PENGGUNA, SHG SETIAP ATASAN MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB UTK MELAKUKAN PEMBINAAN THD ANGGOTA YG BERMASALAH, SEKALIGUS ANGGOTA MERASA DIPERHATIKAN
4. LAKUKAN MAPPING PNPP BERMSLH DAN BERIKAN RUANG UTK SHARING MASALAHNYA
5. PERANKAN SEMUA ATASAN SBG KONSELOR, SHG ANGGOTA MEMPUNYAI TEMPAT UTK BERKELUH KESAH THD MASALAH YG DIHADAPI (KEMBANGKAN TRS KONSEP PENDEKATAN EMOSIONAL)
6. BERIKAN MOTIVASI KDP SELURUH PNPP UTK MENGIKUTI BINROHTAL YG DIPROGRAMKAN DINAS, DILUAR DINAS DAN MENJALANKAN IBADAH RUTIN SESUAI KEYAKINANNYA
7. TERHADAP PNPP BERMASALAH, SEBELUM SIDANG AGAR DILAKUKAN PENDALAMAN PSIKOLOGI SHG HASILNYA DPT DIGUNAKAN SBG PERTIMBANGAN DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DLM SIDANG
8. BERIKAN KETELADANAN ATASAN SCR BERJENJANG, SHG BAWAHAN MEMPUNYAI FIGUR PANUTAN, TERDAPAT PEPATAH “SATU KETELADANAN LEBIH BERARTI DARI PADA SERIBU NASEHAT”
9. DORONG PNPP UTK MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA DGN MEMBERIKAN VASILITAS / WAKTU MENGIKUTI GIAT KEAGAMAAN DI KESATUAN SCR LSG MAUPUN MEDIA LAINNYA



PRESISI

PREDIKSI RESPONSIVITAS TRANSPARANSI PERKEADILAN

Berlakunya Perpol No 7 Thn 2022 ttg KEP dan KKEP yang ditandatangani oleh Kapolri tanggal 14 Juni 2022 serta diundangkan tanggal 15 Juni 2022 oleh Menkum dan HAM, maka terhadap Perkap No 14 Thn 2011 ttg KEP Polri dan Perkap No 19 Thn 2012 ttg Organisasi dan Tata Kerja KKEP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dalam Perpol No 7 Thn 2022 terdapat ketentuan yg menyangkut tugas pengembangan fungsi SDM, namun dari hasil penelaahan didapati bhw tugas pengembangan fungsi SDM masih perlu dikordinasikan lebih lanjut dengan fungsi terkait



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



Sanksi ETIKA
(Psl 93 – 95)



1. Perbuatan pelanggar dinyatakan sbg perbuatan tercela
2. Minta maaf secara lisan dan tertulis kpd Pim Polri dan Pihak yang dirugikan melalui Sidang KKEP
3. Mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi

Sanksi ADM
(Psl 96 – 97)



1. Mutasi bersifat demosi
2. Tunda kenaikan pangkat
3. Tunda pendidikan
4. Patsus
5. PTDH



PETIKAN putusan Sidang KKEP diserahkan kpd Fungsi SDM (Psl 92) yg selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan KEPUTUSAN sesuai jenis sanksi yg diputuskan pada sidang KKEP



Perintah pelaks Sanksi Patsus oleh penuntut:
Dilaks mulai ... sd...
Kep Sanksi Patsus menyesuaikan dgn Put Sidang krn dpt dipatsus sblm pelaks Sidang



PRESIKI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng.com

SANKSI ADM (Psl 96):

Sanksi Adm dilaks oleh Pelanggar setelah diterbitkan KEPUTUSAN (sesuai jenis sanksi) oleh Fungsi SDM sesuai dengan kewenangannya, maksimal:

- a. 14 (empat belas) hari sejak diterima putusan KKEP yg final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, sanksi administrasi berupa:
 - 1) mutasi bersifat demosi paling singkat 1 thn
 - 2) tunda UKP paling singkat 1 thn dan paling lama 3 thn
 - 3) tunda DIK paling singkat 1 thn dan paling lama 3 thn
 - 4) patsus paling lama 30 hari
- b. 30 (tiga puluh) hari sejak diterima putusan KKEP yg final dan mengikat dari Sekretariat KKEP untuk sanksi administratif berupa PTDH

Format baku/contoh Keputusan penetapan saksi belum ada dalam lampiran Perpol 7 Tahun 2022, sedangkan pada Perkap 14 Tahun 2011 dan Perkap 19 Thn 2012 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Psl 113)

Hasil koord dengan Rowabprof dan Rowatpers SSDM Polri belum ada jawaban yang pasti tentang format baku Kep Penetapan Sanksi thd pelanggar, shg perlu dibuat tanpa mengubah urgensi hukuman



SANKSI ADM BRP MUTASI BERSIFAT DEMOSI



BAB I (KETENTUAN UMUM) NO. 30

MUTASI BERSIFAT DEMOSI : PEMINDAHAN ANGGOTA DR SAT JAB KE JAB LAIN YG TINGKATNYA LBH RENDAH

PEMAHAMAN

PD KETENTUAN INI, MUTASI BERSIFAT DEMOSI DIPERUNTUKAN ANGGT POLRI YG MENDUDUKI JAB PA

DLM MEMUTUSKAN HUK/SANKSI ADM BERUPA MUTASI BERSIFAT DEMOSI AGAR LBH HATI-HATI, APABILA PELANGGAR TDK BERNIAT DI MUTASI KELUAR KESATUAN

BAB III (BAG KEDUA), PSL 97 (1)

MUTASI BERSIFAT DEMOSI : KASATKER TEMPAT PELANGGAR BERTUGAS WAJIB MENGHADAPKAN PELANGGAR KPD KASATKER BARU DGN SRT PENGHADAPAN PALING LAMA 14 HARI KERJA, SEJAK MENERIMA TEMB KEP MUTASI

PEMAHAMAN

PD KETENTUAN INI MUTASI BERSIFAT DEMOSI UTK ANGGT POLRI YG TDK MENDUDUKI JAB PA, MAKA PELAKS SANKSI HRS MEMUTASI YBS KELUAR KESATUAN (MUTASI ANTAR KESATUAN MENJD KEWENANGAN POLDA)



BAB XI (PENGENAAN SANKSI ETIKA DAN ADM)

PSL 111 :

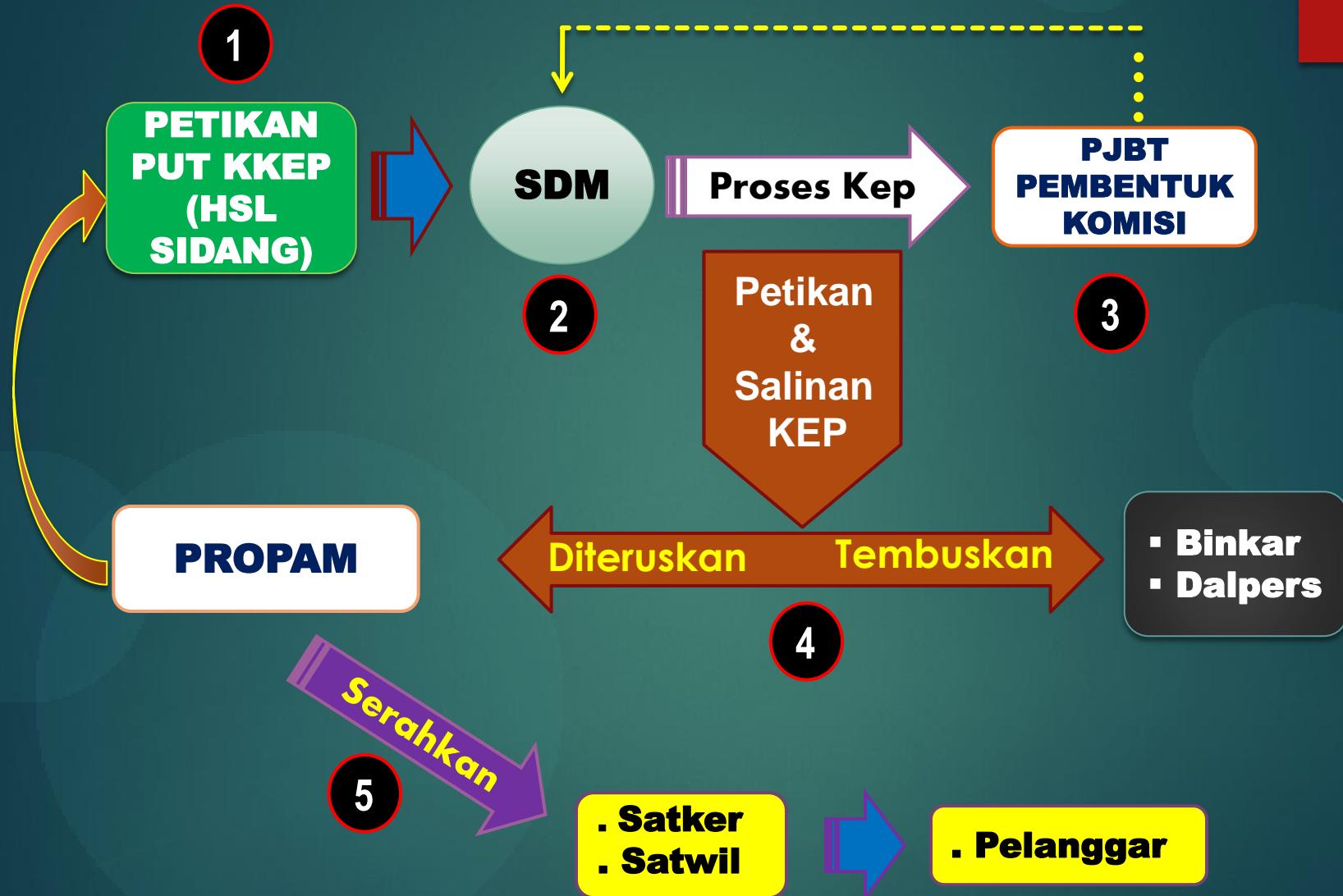
- (1) THD TERDUGA PELANGGAR KEPP YG DIANCAM DGN SANKSI PTDH DIBERIKAN KESEMPATAN UTK MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI DR DINAS POLRI ATAS DASAR PERTIMBANGAN TERTENTU SBLM PELAKS SIDANG KKEP
- (2) PERTIMBANGAN TERTENTU SBGMN DIMAKSUD MELIPUTI :
 - a. MEMILIKI MASA DINAS PALING SEDIKIT 20 THN;
 - b. MEMILIKI PRESTASI, KINERJA YG BAIK, DAN BERJASA KPD POLRI, BANGSA DAN NEGARA SEBLM MELAKUKAN PELANGGARAN, DAN
 - c. TDK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 THN

PEMAHAMAN:

1. PERTIMBANGAN TERTENTU SBGMN DIATAS, BERLAKU SCR MELENGKAPI DARI 3 ASPEK, TDK DPT BERDIRI SENDIRI-SENDIRI, AL:
 - a. MEMILIKI MASA DINAS PALING SEDIKIT 20 THN (TERHITUNG DR KEP PENGANGKATAN i)
 - b. MEMILIKI PRESTASI, KINERJA YG BAIK, DAN BERJASA KPD POLRI, BANGSA DAN NEGARA SEBLM MELAKUKAN PELANGGARAN DILAKUKAN OLEH KASATKER DGN MENILAI :
 - SEMUA ASPEK KINERJA DAN LOYALITAS DR TERDUGA PELANGGAR OLEH ATASAN ANKUM SCR TERTULIS
 - APABILA HSL PENILAIAN ATASAN ANKUM BERKESIMPULAN JASA LBH BANYAK DR KADAR PELANGGARAN, MK THD TERDUGA PELANGGAR UTK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SBG ANGGT POLSRI SCR TERTULIS YG DITEMBUSKAN KPD SEKRETARIS KKEP
 - APABILA DISETUJUI, MK BERKAS RIK GAR KEP YG DIBUAT AKREDITOR DIKEMBALIKAN KPD AKRIDITOR DGN KET PERKARA TDK DILANJUTKAN, KRN ALASAN HUKUM TERDUGA PELANGGAR TLH DISETUJUI PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRINYA DAN ARSIP DISIMPAN SEKRETARIAT KKEP
 - c. MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 THN
2. PENILAIAN DIBUAT SCR TERTULIS DR ANKUM KEPADA ATASAN ANKUM



PENERBITAN KEP PEMBERIAN SANKSI ADM BERDASARKAN PUT KKEP



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng

PENJELASAN

1. PERMINTAAN PENERBITAN KEP OLEH PENGEMBAN FUNGSI PROPAM KPD FUNGSI SDM DGN MELAMPIRKAN PUTUSAN SIDANG KKEP
2. SDM MEMPROSES KEP PEMBERIAN SANKSI DAN DIAJUKAN PENGESAHAN KPD PEJABAT PEMBENTUK KOMISI SESUAI TINGKAT SIDANG (SIDANG THP I ATAU BANDING)
3. SETELAH KEP PEMBERIAN SANKSI DISAHKAN OLEH PEJABAT PEMBENTUK KOMISI, KEP DITERIMA KEMBALI OLEH SDM SELANJUTNYA DIBUATKAN PETIKAN DAN SALINAN KEP
4. SDM MENYERAHKAN PETIKAN DAN SALINAN KPD PROPAM SERTA DITEMBUSKAN KE BINKAR DAN/ATAU DALPERS UTK DITINJUT SESUAI JENIS PUTUSANNYA
5. PROPAM MENERUSKAN PENYERAHAN KEP KPD SATKER/SATWIL UNTUK SELANJUTNYA DITERIMAKAN KPD PELANGGAR



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS DILINGKUNGAN POLRI



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



birosdm.poldajateng



<http://birosdm.poldajateng.com>

PEDOMANI

PERPOL NO. 01 THN 2019
TANGGAL 02 APRIL 2019 TENTANG
*PENGAKHIRAN DINAS PEGAWAI
NEGERI PADA POLRI*

MENGATUR ADMINISTRASI DAN TATA
CARA TENTANG :

- a. MPP
- b. DDDA
- c. PENYALURAN KERJA
- d. LATRAM
- e. PDH
- f. PTDH
- g. PELAYANAN HAK PENSIUN

RUMPUN KEDOKTERAN MADYA

PNS SBG PEJABAT PIM TINGGI DAN
PEJABAT AHLI FUNGSIONAL MADYA
USIA PENSIUN 60 THN
(UU NO. 11 THN 1969 PSL 6 (3) DAN
PERPOL NO. 01 THN 2019)

KEAHlian KHUSUS YG DIPERSYARATKAN DLM USULAN DDDA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• IDENTIFIKASI• LAB FORENSIK• KOMUNIKASI ELEKTRONIK• PERSANDIAN• PENJINAK BOM | <ul style="list-style-type: none">• KEDOKTERAN KEHAKIMAN• PAWANG HEWAN• PENYIDIK KEJAHATAN TERTENTU• NAVIGASI LAUT / PENERBANGAN |
|---|---|

PERS DDDA TDK BOLEH ALIH FUNGSI PD BID LAIN

- * USULKAN 6 BLN SEBELUM PENSIUN/JGN TERLAMBAT
- * DOK ADM HRS LENGKAP DAN BENAR
- * TELITI, CHEK AND RECHEK SERTA KOORDINASI



PRESIKI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

ATENSI:

- KEP PDH PNS MENDASARI PERTEK BKN
- APABILA TERLAMBAT USULAN, AKAN BERDAMPAK PD KETERLAMBATAN TERBITNYA PERTEK (DLM PERTEK AKAN TERTERA KETETAPAN KENAIKAN PKT HAR DAN MS KERJA YBS)
- SATKER/SATWIL PROAKTIF, CEK DR SIPP UTK AKSES DOK DAN ADM KELENGKAPAN USULAN

**PSL 306 PP 11 THN
2017 TTG
MANAJEMEN PNS**

**USUL
PERTIMBANGAN
TEKNIS
(PERTEK)
KE BKN**

**USULAN
SATKER SATWIL
(6 BLN SBLM PDH)**

**PJBT PEMBINA
KEPEGAWAIAN/
PPK (KAPOLDA)**

**BIRO
SDM**

**MENDASARI
PERTEK, BIRO
SDM PROSES
KEP PDH**

COPY PETIKAN

PNS YBS

COPY PETIKAN

ASLI

ASABRI



PRESISI

BERPENGARUH BERPRESTIGI BERKEADILAN

**“SESEORANG BOLEH SALAH DALAM BERTINDAK,
ASAL TIDAK SALAH DARI PIKIRANNYA”**

**MASIH BANYAKNYA PNPP POLDА JATENG YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN
MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA**



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



LANGKAH YG PERLU DILAKUKAN :

1. ISI WAKTU DGN KEGIATAN YG POSITIF, KHUSUSNYA DILUAR PEKERJAAN KANTOR
2. SETIAP AKAN BERBUAT NEGATIF SENANTIASA INGAT ADA KELUARGA BESAR YG MEMBANGGAKAN DAN BUTUH KITA
3. MENCARI TEMAN/LINGK PERGAULAN YG BAIK/BERTEMAN DGN ORANG SHOLEH DAN TAAT IBADAH
4. TANAMKAN RASA BANGGA BEKERJA DILINGK POLRI, KITA TDK MEMPUNYAI KEAHLIAN LAIN
5. SENANTIASA BERSYUKUR ATAS KARUNIA-NYA (TLH MENDPTKAN PEKERJAAN TETAP, KRN DISEKITAR KITA BYK MASYARAKAT YG EKONOMINYA KRG BERUNTUNG), INGAT MASA PANDEMI YG LALU
6. SERING MUHASABAH / INTROSPEKSI DIRI TTG APA YG SDH DILAKUKAN SELAMA INI, MANA YG BAIK DAN YG SALAH



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

7. MAU TERIMA KRITIK DAN SARAN DENGAN HATI TERBUKA, MUNGKIN ADA PERTANYAAN DLM HATI...., MEMPERBAIKI DIRI ITU DIMULAI DR MANA
8. BIASAKAN DIRI UNTUK HIDUP DISIPLIN DAN MENGHARGAI WAKTU, KRN KESEMPATAN TDK AKAN TERULANG
9. MEMBEDAKAN MANA YG BAIK DAN MANA YG BURUK, SHG SIAP MENERIMA PERUBAHAN APAPUN
10. BERANI MENGAMBIL SIKAP UTK KELUAR DR LINGK NYAMAN, KRN HAL INI SALAH SATU CIRI KEDEWASAAN SESEORANG
11. JANGAN MUDAH MENYALAHKAN ORANG LAIN, BELAJARLAH DR PERMASALAHAN SEBELUMNYA
12. JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, MENGAKUI KESALAHAN DAN MOHON MAAF
13. SENANTIASA TANAMKAN DLM HATI, IBADAH BKN HANYA KEWAJIBAN TETAPI MRPKAN SUATU KEBUTUHAN



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

ANDA BEBAS MEMILIH, NAMUN PILIHAN YANG ANDA PILIH HARI INI
AKAN MENENTUKAN APA YANG ANDA MILIKI,
AKAN JADI APA ANDA NANTI DAN APA YANG AKAN DILAKUKAN
PADA MASA DEPAN ANDA

SESEORANG DAPAT MENGUBAH MASA DEPANNYA
HANYA DENGAN MENGUBAH SIKAPNYA

ANDA TIDAK DAPAT MENGUBAH MASA DEPAN ANDA
ANDA BISA MENGUBAH KEBIASAAN ANDA, DAN
TENTUNYA KEBIASAAN ANDA AKAN MENGUBAH MASA DEPAN ANDA

JIKA ANDA TIDAK MENINGGALKAN MASA LALU,
ITU AKAN MENGHANCURKAN MASA DEPAN ANDA

LUPAKAN MASA LALU ANDA, MAAFKAN DIRI ANDA, DAN MULAI LAGI
KEHIDUPAN DARI SEKARANG.....



PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN



birosdm.poldajateng



birosdm polda jateng



http://birosdm.poldajateng.com



**1000 ORANG TIDAK PERCAYA PADA
KEMAMPUAN KITA ITU TIDAK JADI MASALAH
TAPIIIII....**

**KALAU KITA TIDAK PERCAYA PADA DIRI SENDIRI
ITU BARU BENCANA**

SEMARANG, 14 FEBRUARI 2023